



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI Rianto
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NIK : 216235

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.747.460.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/120 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 768.960.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m²/36 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/36 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000
4. Tanah Seluas 1680 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 172.500.000
5. Tanah Seluas 700 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. Tanah Seluas 472 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
7. Tanah Seluas 1467 m² di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 72.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 237.255.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	355.267.268
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.412.482.268
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.412.482.268

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.